

Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Lhokseumawe Melalui Penerapan Kinerja Berbasis Balanced Scorecard Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah

Zulkarnaini¹, Anhar Firdaus², Lakharis Inuzula³, Julia Alfianti⁴, Kheriah⁵

^{1,2,3,4} Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

¹zulkarnaini@pnl.ac.id

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh apa kesiapan pemerintah daerah Kota Lhokseumawe untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis Syariah melalui penerapan kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC). Penelitian ini menggunakan alat statistik Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk memastikan apakah kinerja pemerintah daerah melalui penerapan BSC mampu untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif berbasis Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Financial Perspective merupakan faktor paling dominan yang akan mendorong penilaian dan peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui penerapan kinerja berbasis Balanced Scorecard. Selanjutnya Customer Perspective merupakan faktor kedua yang mampu menjelaskan kinerja BSC, yang kemudian diikuti oleh Internal Business Process Perspective. Sedangkan dimensi paling rendah terdapat pada Learning and Growth Perspective yang akan mendorong penilaian dan peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui penerapan kinerja berbasis Balanced Scorecard. Melalui basis kinerja BSC, kemudian Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe terutama perlu menciptakan pola pengembangan ekonomi kreatif yang mampu mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat secara berkesinambungan berbasis kearifan lokal (syariah) yang sesuai dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018. Selain itu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan bidang yang digeluti, sehingga akan menciptakan kualitas SDM yang unggul bagi pengembangan program daerah. Perbaikan kualitas proses bisnis internal pemerintah Kota Lhokseumawe juga harus dilakukan dengan menggunakan otonomi daerah yang disesuaikan dengan aturan pemerintah pusat.

Kata kunci— Kinerja; *Balanced Scorecard*; ekonomi kreatif; *Confirmatory Factor Analysis*.

Abstract— This study aims to see how far the local government of Lhokseumawe City is prepared to develop a Sharia-based creative economy through the implementation of performance based on the Balanced Scorecard (BSC). This study uses a statistical tool Confirmatory Factor Analysis (CFA) to ascertain whether local government performance through the application of BSC indicators is able to develop creative economic potential. The results of the study show that the Financial Perspective is the most dominant factor that will drive the assessment and improvement of local government performance through the implementation of performance based on the Balanced Scorecard. Furthermore, the Customer Perspective is the second factor that is able to explain the performance of the BSC, which is then followed by the Internal Business Process Perspective. While the lowest dimension is in the Learning and Growth Perspective which will encourage the assessment and improvement of local government performance through the implementation of performance based on the Balanced Scorecard. Through the BSC performance basis, the Regional Government of Lhokseumawe City especially needs to create a creative economic development pattern that is able to encourage sustainable community economic growth based on local wisdom (syariah) in accordance with the implementation of Qanun Islamic Financial Institutions No. 11 of 2018. In addition, the quality of Human Resources (HR) must be improved through increasing competence and expertise in accordance with the fields they are involved in, so that it will create superior quality human resources for the development of regional programs. Improving the quality of the internal business processes of the Lhokseumawe City government must also be carried out by using regional autonomy which is adjusted to the rules of the central government.

Keywords— Balanced Scorecard, Creative economy, Confirmatory Factor Analysis.

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Upaya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dalam suatu daerah dapat dicapai apabila pemerintah daerah mampu bekerja dengan baik dan menghasilkan kinerja yang cemerlang melalui program-program berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kinerja tidak hanya merupakan bentuk faktual dari hasil kerja, namun kinerja menggambarkan kemampuan implementasi berbagai kebijakan bagi sebuah daerah. Melalui hasil kinerja yang baik dan terukur, maka sebuah hasil perencanaan dan implementasi kegiatan dapat juga dijadikan pedoman dan pijakan terhadap rencana pengembangan kerja dimasa yang akan datang. Demikian pula halnya dengan pemerintah daerah yang sangat sarat akan berbagai kepentingan masyarakat serta pengaruhnya oleh berbagai kebijakan politik, sosial, ekonomi maupun budaya, sehingga mampu menciptakan berbagai fenomena yang mempengaruhi pertumbuhan suatu daerah. Oleh karena itu, sangat masuk akal apabila pemerintah daerah wajib memikirkan bagaimana cara untuk mendorong terciptanya

kinerja yang lebih positif dan terukur dalam berbagai bidang, termasuk bidang keuangan yang mampu menciptakan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

[1]. Hal ini cukup rasional guna memperoleh keyakinan yang memadai terhadap segala bentuk tindakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Untuk lebih mendorong pemerintah daerah menemukan kualitas dalam melaksanakan fungsi sebagai agen perubahan bagi masyarakat, maka pemerintah harus mampu menemukan alat yang tepat dalam mengukur hasil kerja dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian penerapan pengukuran kinerja yang tepat akan sangat membantu dalam memahami hasil yang dicapai. Salah satu alat pengukur kinerja yang sudah teruji dan mampu menilai baik faktor keuangan maupun non keuangan adalah *Balanced Scorecard* (BSC). Melalui BSC pemerintah akan diarahkan pada penciptaan nilai-nilai kerja yang lebih profesional dan memiliki tujuan yang terukur serta strategi yang tepat. Disamping itu BSC digunakan untuk menyeimbangkan usaha dan perhatian eksekutif terhadap kinerja keuangan maupun non keuangan serta kinerja jangka pendek dan jangka panjang

[2]. Oleh karena itu, dalam melakukan penerapan BSC maka pemerintah daerah harus memahami terlebih dahulu dengan baik menyangkut praktik dan tatacara untuk melaksanakan pengukuran kinerja yang tepat, sehingga akan memperoleh hasil yang memadai. Kinerja pemerintah menyangkut keuangan saja tidak cukup, karena sifat output sektor publik lebih banyak bersifat *intangible output*, oleh karena itu perlu dikembangkan kinerja nonfinansial [3]. Dengan demikian pemerintah daerah harus memetakan terlebih dahulu bagaimana unsur-unsur BSC dapat dijadikan sebagai indikator penilaian kinerja agar mudah diperoleh ukuran yang layak.

Melalui pengukuran kinerja, pihak pemerintah daerah akan mampu memahami dan mendapatkan rekomendasi untuk pengembangan daerah di masa mendatang. *Balanced Scorecard* tidak hanya dikenal sebagai alat pengukur kinerja multidimensional yang menggabungkan aspek keuangan dan non keuangan, akan tetapi juga dikenal sebagai suatu sistem strategik manajemen yang terintegrasi [4]. Apabila proses penerapan kinerja melalui BSC telah dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah, maka arah pengembangan daerah pada berbagai hal akan mudah ditetapkan dalam berbagai prioritas capaian program yang mampu mengangkat prestasi daerah. Banyak hal yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah saat ini dengan mengacu pada potensi daerah yang dimiliki. Salah satu tuntutan perkembangan daerah saat ini yang mampu memberikan efek atau dampak pada pengembangan daerah secara luas adalah pengembangan potensi ekonomi kreatif. Pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia saat ini cukup tinggi, yaitu sekitar 5,76% dibandingkan dengan sektor lain seperti gas, listrik, maupun air bersih [5]. Potensi ekonomi kreatif akan menciptakan nilai tambah dan akan berdampak bagi daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga akan mampu menjamin tingkat kemandirian daerah.

Ekonomi kreatif dalam suatu daerah harus dapat dijadikan sebagai alat atau komoditi yang mampu membedakan ciri dari sebuah daerah dengan daerah lainnya. Ekonomi kreatif yang unggul akan mampu mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dengan sangat cepat melalui berbagai sektor industri kecil dan menengah. Hal ini terbukti dari kontribusi yang diberikan oleh ekonomi kreatif untuk Indonesia pada tahun 2019 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp. 1.165 Triliun [6]. Melalui pelaku-pelaku bisnis yang ada akan mendorong daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil dan cenderung meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menciptakan penghasilan. Disamping itu juga tidak dapat dipungkiri bahwasanya perkembangan ekonomi tersebut akan menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang memiliki daya saing tinggi dalam mencapai tingkat kesejahteraan. Bahkan ketangguhan ekonomi kreatif telah terbukti sebagai konsep yang paling jitu disaat perusahaan besar mengalami gulung tikar pada saat krisis Indonesia terjadi [7]. Oleh karena itu sangat perlu bagi pemerintah daerah untuk menemukan metode yang tepat dan sesuai dalam mengembangkan ekonomi daerah melalui sistem berbasis kearifan lokal. Khususnya bagi pemerintah Aceh, sistem berbasis Syariah menjadi pilihan utama bagi pengembangan ekonomi daerah yang diperkuat oleh Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Melalui Qanun tersebut, diharapkan pengembangan ekonomi daerah dalam berbagai hal harus dilandasi oleh sistem Syariah. Pemerintah daerah meyakini bahwa melalui sistem Syariah, usaha masyarakat dan pengembangan potensi daerah lainnya

akan semakin kuat melalui adanya nilai-nilai Islam yang mampu mendorong tingkat kejujuran dan rasa sosial dalam berbisnis.

Demikian pula halnya dengan daerah Kota Lhokseumawe yang saat ini telah sangat berkembang dan dikenal melalui keberadaan perusahaan-perusahaan provita yang menjanjikan. Pemerintah Kota Lhokseumawe harus melakukan analisis dan kajian yang tepat dan terukur dalam pengembangan potensi ekonomi kreatif. Tahun 2021, Kota Lhokseumawe mengalami pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan Provinsi Aceh dan Nasional yaitu masing-masing sekitar 2,79% dan 3,69% [8]. Namun disisi lain pemerintah daerah Kota Lhokseumawe juga harus mampu memperbaiki bagaimana sebaiknya untuk mengembangkan potensi daerah disatu sisi, namun harus mampu memahami potensi diri terlebih dahulu melalui capaian kinerja daerah yang dapat diukur melalui berbagai indikator yang valid dan spesifik. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa dimasa yang akan datang pengembangan daerah melalui ekonomi kreatif akan dapat diwujudkan dengan mudah dan bertanggungjawab. Pemerintah daerah harus mampu membaca potensi diri melalui kinerja yang dicapai, serta bagaimana mengembangkan daerah dengan baik dan tepat akan menjadi sebuah pertimbangan nyata untuk menghasilkan daerah yang mandiri dan bebas dari tekanann.

I.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Indikator-indikator apa saja yang mampu mendorong penilaian dan peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui penerapan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* bagi pemerintah Kota Lhokseumawe.
2. Indikator-indikator apa saja yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis Syariah bagi daerah di Kota Lhokseumawe.
3. Bagaimana tindakan pemerintah daerah Kota Lhokseumawe dalam mendorong berbagai kebijakan yang harus ditetapkan berdasarkan prioritas yang meliputi hasil kinerja dan ekonomi kreatif berbasis syariah.

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur besarnya nilai masing-masing indikator pada unsur kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC), sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas dan terukur mengenai kekuatan dan kelemahan kinerja pemerintah daerah Kota Lhokseumawe baik sisi keuangan maupun non keuangan.
- b. Untuk mengukur seberapa besar nilai masing-masing potensi pengembangan ekonomi kreatif berbasis syariah yang akan digunakan oleh pemerintah daerah Kota Lhokseumawe sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan daerah yang lebih terarah dan tepat bagi pelaku bisnis industri kecil dan menengah (UKM).
- c. Menemukan formulasi yang tepat bagi pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pengembangan daerah Kota Lhokseumawe yang meliputi pengukuran dan penilaian kinerja pemerintah daerah serta implementasi ekonomi

kreatif berbasis kearifan lokal yang pada akhirnya akan melahirkan kebijakan yang tepat.

I.4. Kinerja *Balanced Scorecard*

Menurut Kaplan dan Norton dalam [9] bahwa *Balanced Scorecard* merupakan sistem manajemen yang dapat memotivasi peningkatan terobosan dalam bidang kritis semacam itu, seperti produk, proses pelanggan, dan perkembangan pasar. Sedangkan Mulyadi (2007:3) menyatakan bahwa “*balanced scorecard* merupakan alat manajemen kontemporer yang didesain untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melipat gandakan kinerja keuangan luar biasa secara berkesinambungan (*sustainable outstanding financial performance*)”.

Menurut [10] *Balanced Scorecard* adalah sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggung jawaban berdasarkan strategi, menerjemahkan misi dan strategi organisasi kedalam tujuan operasional dan ukuran kinerja dalam empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (infrastruktur).

Menurut [11] menyatakan bahwa “*Balanced Scorecard provides executives with a comprehensive framework that translates a company’s strategic objectives into a coherent set of performance measures*”. Selanjutnya, [12] mendefinisikan *Balanced Scorecard* sebagai suatu sistem pengukuran kinerja manajemen strategis, yang diturunkan dari visi dan strategi dan merefleksikan aspek- aspek terpenting dalam suatu bisnis. Sedangkan menurut [13] *Balanced Scorecard* merupakan kumpulan ukuran kinerja yang terintegrasi yang diturunkan dari strategi perusahaan yang mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan”.

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa *balanced scorecard* merupakan suatu sistem manajemen, pengukuran, dan pengendalian yang secara cepat, tepat dan komprehensif dan dapat memberikan pemahaman kepada manajemen tentang kinerja bisnis. Pengukuran kinerja tersebut memandang unit bisnis dari empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Balanced Scorecard terdiri dari dua kata yaitu *balanced* yang berarti seimbang dan *scorecard* yang berarti kartu skor. *Scorecard* adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seorang atau suatu kelompok, juga untuk mencatat rencana skor yang hendak diwujudkan. Pada tahap berikutnya organisasi tersebut akan dievaluasi kinerjanya dengan membandingkan antara apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah direncanakan. Sementara itu, pengertian *balanced* adalah bahwa kinerja seseorang atau kelompok tertentu akan diukur secara berimbang. Berimbang antara sisi internal dan eksternal perusahaan, dan berimbang pula antara perspektif proses dan orang.

Balanced Scorecard menurut [12] dapat digunakan dalam tiga cara, yaitu sebagai alat pengukuran kinerja, sistem manajemen strategis, dan alat komunikasi. Pada intinya *Balanced Scorecard* merupakan suatu sistem pengukuran, penelusuran hasil-hasil dari berbagai tujuan dan ukuran dapat membantu mengukur efektivitas pencapaian strategi perusahaan. Kemudian menciptakan suatu sistem manajemen strategis pada kompensasi dan perencanaan bisnis, peninjauan ulang manajemen, dan proses kunci lainnya. Selanjutnya,

Balanced Scorecard berfungsi sebagai alat komunikasi yang ampuh. Melalui pendistribusian *Scorecard*, setiap karyawan perusahaan akan menyadari visi, strategi, dan ukuran kesuksesan perusahaan.

Dalam konsep *balanced scorecard* yang telah dipaparkan di atas, maka empat perspektif yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada [14] menjelaskan bahwa:

- Perspektif *financial*; menjelaskan bagaimana perusahaan berpikir untuk mewujudkan keinginan dari pemegang saham melalui berbagai indikator yang mampu ditunjukkan dalam laporan keuangan seperti penilaian berbagai rasio keuangan yang mampu mendorong kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Dalam hal ini perusahaan harus menciptakan berbagai strategi yang mampu mendukung korporasi dengan tujuan meningkatkan profitabilitas, pengembalian aktiva dan pendapatan.
- Perspektif pelanggan; dengan melakukan identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasuki, karena segmen ini akan menjadi komponen penghasilan tujuan *financial* perusahaan.
- Perspektif proses bisnis internal; pencapaian tujuan dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh proses yang sangat penting untuk menciptakan kepuasan pelanggan dan pemegang saham. Perspektif ini terdiri dari tiga rantai nilai yaitu inovasi, operasi dan layanan purna jual.
- Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan; kemampuan untuk mencapai sasaran-sasaran ambisius tujuan *financial*, pelanggan dan proses bisnis internal perusahaan.

Tidak berbeda jauh dengan pemerintahan atau sektor public, BSC dapat digunakan melalui berbagai modifikasi kepentingan dan kebutuhan pemerintah yang diturunkan dari visi dan misi ke dalam serangkaian tindakan untuk melayani masyarakat [15]. Sektor public memiliki tanggungjawab untuk menunjukkan kemampuan bagaimana uang public dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien [16]. Oleh karena itu bagi pemerintah daerah khususnya, harus benar-benar menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya sebagai agen bagi perubahan kehidupan masyarakat dengan menunjukkan kinerja yang lebih baik.

I.5. Ekonomi Kreatif

Persoalan ekonomi kreatif masih merupakan hal baru yang saat ini sedang diterapkan oleh pemerintah kepada seluruh daerah yang ada di Indonesia. Menurut Inpres Nomor 6 Tahun 2009, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Disamping itu Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008) merumuskan ekonomi kreatif sebagai upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Definisi yang lebih jelas disampaikan oleh UNDP (2008) yang merumuskan bahwa ekonomi kreatif merupakan bagian integratif dari pengetahuan yang bersifat inovatif, pemanfaatan teknologi secara kreatif, dan budaya.

Menyinggung potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka kesempatan terhadap pengembangan ekonomi kreatif merupakan nilai lebih yang mampu dicapai oleh pemerintah daerah. Dalam rangka pengembangan potensi

daerah, ekonomi kreatif tidak hanya melibatkan masyarakat atau komunitas sebagai sumber daya yang berkualitas, tetapi juga keterlibatan unsur birokrasi dengan pola *entrepreneurship* (kewirausahaan). Konsep keterlibatan birokrasi dalam ekonomi kreatif adalah bahwa birokrasi tidak hanya membelanjakan tetapi juga menghasilkan (*income generating*) dalam arti positif [17].

Menurut [18] menjelaskan bahwa pada hakikatnya ekonomi kreatif lebih merupakan kegiatan ekonomi yang mengutamakan pada kreativitas berfikir untuk dapat menciptakan sesuatu yang memiliki nilai dan berbeda, serta mengandung nilai jual. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mengandung makna bahwa hasil penciptaan kreativitas yang muncul lebih kepada tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Ekonomi kreatif tidak hanya mampu menciptakan nilai tambah secara ekonomi, namun juga nilai tambah secara sosial, budaya dan lingkungan [19]. Dengan demikian seluruh aspek yang terdapat pada suatu daerah harus dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah daerah guna mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat.

I.6. Basis Syariah

Salah satu bagian yang paling penting dan sangat berpengaruh dalam suatu sistem adalah bagaimana menciptakan sistem tersebut menjadi lebih terkendali dan memiliki nilai *feedback* yang mampu memberikan muatan perbaikan yang terjamin. Hal ini menjadi fokus bagi setiap organisasi, tidak terkecuali pemerintah. Khususnya bagi pemerintah daerah yang memiliki sistem pemerintahan dengan otonomi khusus, maka hal ini menjadi sebuah tuntutan yang wajib dilaksanakan. Bagi daerah seperti Aceh, yang sangat terkenal dengan syariahnya, maka sistem ini layak diterapkan pada berbagai implementasi dalam menjalankan pemerintahan.

Mengacu pada prinsip dasar syariah yang dikembangkan melalui ekonomi Islam, dan jelas sekali berbeda dengan konstruksi ekonomi kapitalis, maka ekonomi Islam tersebut sangat dekat dengan yang disebut nilai-nilai yang melekat pada setiap pelaku ekonomi yaitu manusia. Triyuwono (2000) dalam [20] menjelaskan bahwa realitas alternatif yang relevan dengan nilai material, nilai moral, dan spiritual secara proporsional, atau dengan seperangkat jaringan kuasa Ilahi yang mengikat manusia, diharapkan akan membangkitkan kesadaran diri (*self consciousness*) secara penuh akan kepatuhan dan ketundukkan seorang pada kuasa Ilahi. Hal ini kemudian merupakan nilai syariah secara umum yang penting untuk dikembangkan dan jalan yang jelas yang dapat membawa pada kemenangan [21]. Pada saat manusia merasa bahwa kehidupannya diikat oleh aturan Ilahi, maka akan muncul perilaku yang memiliki basis lebih positif dan sesuai aturan yang diajarkan berdasarkan Islam.

Nilai syariah menjadi kekuatan bagi sebuah sistem, karena ketentuan syariah memiliki sifat yang komprehensif dan universal [22]. Hal ini juga berlaku bagi pemerintahan daerah, dimana bagi daerah yang memiliki otonomi khusus, maka kekhususan nilai-nilai yang mungkin dikembangkan, menjadi satu nilai yang berbeda dengan yang lain.

I.7. Hipotesis

Berdasarkan teoritis yang telah dibahas di atas, maka dapat diturunkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Indikator-indikator yang melekat pada penerapan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* mampu menjelaskan bagaimana kinerja pemerintah daerah dapat dinilai sehingga akan memperlihatkan tingkat kesiapan dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis Syariah.
2. Indikator-indikator pada pengembangan ekonomi kreatif berbasis Syariah dapat diukur dan mampu memperlihatkan tingkat pertumbuhannya.
3. Melalui penerapan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis Syariah akan dapat mendorong tindakan pemerintah daerah untuk menghasilkan berbagai kebijakan dalam pengembangan potensi daerah

II. METODOLOGI PENELITIAN

II.1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* dan ekonomi kreatif berbasis Syariah. Definisi dari masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) **Penerapan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (X_1)** merupakan variabel laten yang nanti akan diturunkan ke dalam berbagai variabel indikator yang digunakan sebagai dasar dalam mendeteksi ukuran yang tepat untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. *Balanced Scorecard* merupakan sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggung jawaban berdasarkan strategi, menerjemahkan misi dan strategi organisasi kedalam tujuan operasional dan ukuran kinerja dalam empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (infrastruktur) [10].
- 2) **Ekonomi Kreatif berbasis Syariah** adalah sebagai kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat (Inpres No. 6 tahun 2009). Namun apabila dihubungkan dengan sistem Syariah, maka ekonomi kreatif memiliki sistem pelaksanaan kegiatan yang berlandaskan atas hukum syariah, dimana segala sesuatu akan mempertimbangkan unsur syariah baik dalam menciptakan daya kreasi dan daya cipta atau menciptakan inovasi yang bernilai ekonomis.

II.2. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah survei dengan menggunakan *deskriptif verifikatif* dengan tujuan untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual dan akurat serta meneliti hubungan antar variabel dengan uji statistik. Penelitian *deskriptif* merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi dan bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current status* dari subjek yang diteliti [23]. Sedangkan penelitian *verifikatif* bertujuan untuk mengetahui kejelasan hubungan suatu variabel (menguji hipotesis) melalui pengumpulan data di lapangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Lhokseumawe. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur yang menduduki jabatan manajerial di lingkungan pemerintahan Kota Lhokseumawe. Metode yang dipakai dalam penentuan sampel adalah *purposive sampling*, yaitu memilih subjek yang berada pada posisi terbaik untuk memberikan informasi yang diperlukan [24]. Alasan pemilihan aparatur yang memiliki jabatan manajerial dengan kriteria tertentu adalah agar memperoleh kondisi yang lebih jelas dan tepat sesuai dengan kinerja yang telah dilaksanakan.

Periode waktu yang digunakan adalah *Cross Sectional*. Menurut [24] bahwa *Cross Sectional* adalah data yang dikumpulkan berasal dari subjek yang berbeda. Sedangkan menurut [25], *cross sectional* (studi silang tempat) dilaksanakan satu kali dan mencerminkan potret dari suatu keadaan pada suatu saat tertentu.

II.3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang telah ditetapkan [26]. Sumber data yang akan digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah jenis data primer (*primary data*). Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara [23]. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban kuesioner dari seluruh responden yang berhasil dikumpulkan.

II.4. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari kuesioner akan dianalisis dengan mempergunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). Model CFA harus dibentuk terlebih dahulu, jumlah variabel laten ditentukan terlebih dahulu, serta identifikasi parameter diperlukan. CFA dibedakan menjadi dua yakni *First Order Confirmatory Factor Analysis* dan *Second Order Confirmatory Factor Analysis* [27].

Confirmatory Factor Analysis adalah metode yang digunakan untuk menguji seberapa baik variabel yang diukur dapat mewakili *construct* atau faktor yang terbentuk sebelumnya. Dalam CFA, terdapat dua macam variabel yaitu variabel laten dan variabel indikator. Variabel laten (*latent variable*) adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dapat dibentuk dan dibangun oleh variabel-variabel lain yang dapat diukur dan variabel tersebut adalah variabel indikator [27].

Model umum analisis faktor konfirmatori adalah sebagai berikut [28].

$$x = \Lambda_x \xi + \delta$$

dimana:

x : merupakan vektor bagi variabel-variabel indikator berukuran $q \times 1$

Λ_x : merupakan matriks bagi *factor loading* (λ) atau koefisien yang menunjukkan hubungan x dengan ξ berukuran $q \times n$

ξ : (ksi), merupakan variabel laten berukuran $n \times 1$

δ : vektor bagi galat pengukuran berukuran $q \times 1$

II.5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data diawali dengan mengelompokkan variabel indikator sesuai variabel latennya dan m menguji

asumsi-asumsi yang terkait. Berikut langkah analisis yang digunakan dalam melakukan penelitian ini.

1. Mendeskripsikan karakteristik penyebaran pada setiap variabel indikator dengan menggambarkan melalui boxplot agar terlihat nilai median, kuartil, minimum, dan maksimum dari masing-masing variabel.
2. Melakukan pengujian seberapa baik variabel yang diukur dapat mewakili *construct* atau faktor yang terbentuk sebelumnya dengan metode *confirmatory factor analysis* (CFA), dengan langkah sebagai berikut:
 - Menguji asumsi distribusi normal multivariat pada *second order* CFA dan diharapkan data memenuhi asumsi distribusi normal multivariat.
 - Melakukan identifikasi model, dan diharapkan model *over identified*.
 - Melakukan pengujian kecocokan antara model dengan data menggunakan kriteria *Goodness of Fits* dan apabila masih belum sesuai dilakukan modifikasi model.
 - Melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui sejauh mana model valid dan reliabel atau tidak.
3. Menginterpretasikan hasil analisis penerapan kinerja berbasis BSC dan ekonomi kreatif berbasis Syariah pada pemerintahan Kota Lhokseumawe dengan menggunakan metode CFA.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

III.1. Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian berkaitan dengan bagaimana setiap indikator yang melekat pada setiap variabel laten yang meliputi variabel penerapan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis Syariah sebagai upaya untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi pengembangan daerah. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebar kepada seluruh aparatur pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Lhokseumawe.

Namun sebelum membahas tanggapan responden untuk masing-masing variabel, dapat diuraikan tingkat pengembalian kuesioner yang telah disebar sebagai berikut:

Tabel 1. Respond Rate

Responden	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali	Respond Rate (%)	Keterangan
Sebanyak 35 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	122 Lembar Kuesioner	119 Kuesioner kembali	98%	3 Orang tidak mengembalikan

Sumber: Data penelitian diolah (2022)

III.1.1. Analisis Tanggapan Responden

Sebelum menguji data melalui model CFA, maka data dapat ditentukan terlebih dahulu pedoman kategorisasi penilaian masing-masing variabel akan mengacu pada ketentuan berikut:

- 1) **Sangat Tidak Baik** jika nilai persentase diantara 20,0% – 36%
- 2) **Tidak Baik** jika nilai persentase diantara 36,1% – 52%
- 3) **Cukup Baik** jika nilai persentase diantara 52,1% – 68%
- 4) **Baik** jika nilai persentase diantara 68,1% – 84%
- 5) **Sangat Baik** jika nilai persentase diantara 84,1% – 100%.

Dari ketentuan kategorisasi di atas, maka perolehan dari tanggapan responden terhadap kuesioner yang telah dibagikan, dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 berikut. Masing-masing variabel akan dapat dilihat besaran nilai yang diperoleh dari tanggapan masing-masing responden.

Tabel 2. Tanggapan Responden Variabel BSC

Kode	Faktor	TCR	%
FP	Financial Perspective	3678	88,3%
CP	Customer Perspective	1806	75,9%
IBP	Internal Business Process Perspective	1257	70,4%
LGP	Learning And Growth Perspective	1203	67,4%
Kinerja Berbasis <i>Balanced Scorecard</i>		7944	78,5%

Sumber: Data penelitian diolah (2022)

Tabel 3. Tanggapan Responden Variabel Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah

Item	Pernyataan	TCR	%
EK_01	Pemerintah perlu untuk menciptakan pola ekonomi kreatif yang menguntungkan bagi perekonomian daerah	539	90,6%
EK_02	Penerapan ekonomi kreatif sangat positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat	526	88,4%
EK_03	Perlunya menciptakan pola ekonomi kreatif yang mampu mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat secara berkesinambungan berbasis kearifan lokal (syariah)	527	88,6%
EK_04	Ekonomi kreatif perlu diciptakan melalui pengembangan sub sektor tertentu daerah yang menjanjikan atas dasar konsep Bagi Hasil	526	88,4%
EK_05	Penerapan ekonomi kreatif harus memiliki nilai kreatifitas yang mampu mendorong variabilitas produk maupun jasa yang bernilai jual	527	88,6%
EK_06	Melalui penerapan ekonomi kreatif akan menghasilkan masyarakat yang memiliki keterampilan yang cukup dalam menyediakan barang maupun jasa	504	84,7%
EK_07	Melalui penerapan ekonomi kreatif akan mendorong bakat masyarakat untuk menciptakan barang maupun jasa yang lebih inovatif	547	91,9%
EK_08	Melalui penerapan ekonomi kreatif akan mendorong jiwa kewirausahaan masyarakat yang dilandasi atas prinsip syariah	532	89,4%

Item	Pernyataan	TCR	%
EK_09	Melalui penerapan ekonomi kreatif harus mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat yang berbasis syariah	523	87,9%
EK_10	Penerapan ekonomi kreatif harus diawasi secara bersama-sama baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan ulama	522	87,7%
Penerapan Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah		5273	88,6%

Sumber: Data penelitian diolah (2022)

Dari hasil perhitungan pada Tabel 2 di atas, diperoleh nilai persentase sebesar 78,5% berada pada rentang persentase antara 68,1% sampai 84% dan terkategori baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan kinerja berbasis *balanced scorecard* pada pemerintah Kota Lhokseumawe sudah diterapkan dengan baik.

Selanjutnya dari hasil pemetaan nilai persentase kedalam gambar garis kontinum, dapat dilihat persentase skor sebesar 88,6% berada pada rentang persentase antara 84,1% sampai 100% dan terkategori sangat baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan ekonomi kreatif berbasis syariah pada pemerintah Kota Lhokseumawe sudah diterapkan dengan sangat baik.

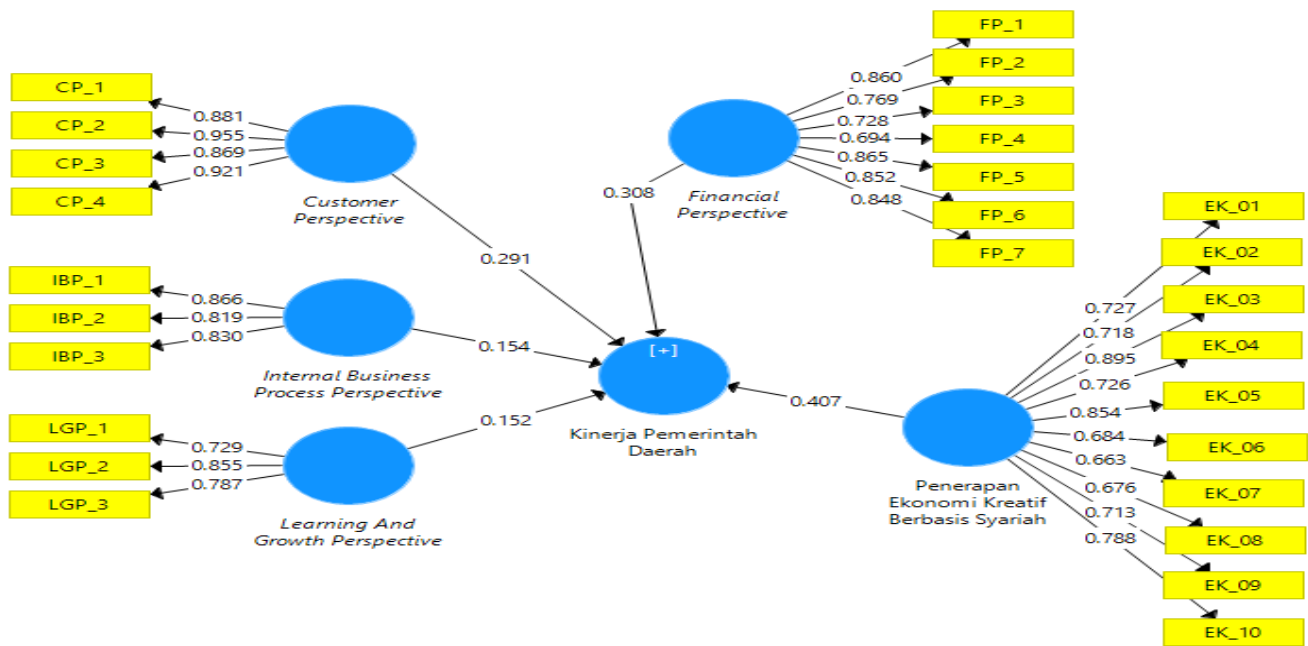
III.1.2. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *confirmatory factor analysis* (CFA) menggunakan permodelan *partial least square* bertujuan untuk mengetahui kesiapan pemerintah Kota Lhokseumawe melalui penerapan kinerja berbasis *balanced scorecard* dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif berbasis syariah.

a. *Confirmatory Factor Analysis* (CFA)

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan metode *confirmatory factor analysis* (CFA) dimana pengujiannya meliputi *convergent validity* dan *discriminant validity* serta pengujian reliabilitas konstruk. Hasil perhitungan dari keseluruhan model menggunakan Smart PLS 3.29 dapat dilihat pada Gambar 1.

Pengujian yang pertama yaitu *convergent validity* yang bertujuan untuk mengkonfirmasi sejauhmana keterkaitan antara variabel manifes (indikator) suatu konstruk terhadap konstruk yang akan dibentuknya. Suatu indikator dikatakan valid atau mampu menjelaskan konstruk (variabel) yang akan dibentuknya apabila memiliki nilai *loading factor* dan nilai AVE (*average variance extracted*) yang lebih besar dari 0,5 (*critical value*). Hasil pengolahan data menggunakan program Smart PLS dapat dilihat pada Tabel 4.



Gambar 1. Diagram Jalur Analisis Faktor Yang Mendorong Penilaian dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe

Tabel 4. Nilai AVE Variabel Penelitian

Kode	Average Variance Extracted (AVE)
CP	0,823
EK	0,560
FP	0,648
IBP	0,703
LGP	0,628

Sumber: Hasil olah data dengan Smart PLS 3.29

Selanjutnya, dari hasil perhitungan diperoleh nilai *loading factor* yang lebih besar dari 0,5 yang menunjukkan seluruh dimensi pembentuk konstruksi dinyatakan valid dan memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variabel yang akan dibentuknya dan prasyarat untuk *convergent validity* telah terpenuhi, seperti pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Nilai Loading Factor

Variabel	Loading Factor	Ket.
CP_1 ← Customer Perspective	0,881	Valid
CP_2 ← Customer Perspective	0,955	Valid
CP_3 ← Customer Perspective	0,869	Valid
CP_4 ← Customer Perspective	0,921	Valid
EK_01 ← Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah	0,727	Valid
EK_02 ← Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah	0,718	Valid
EK_03 ← Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah	0,895	Valid
EK_04 ← Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah	0,726	Valid
EK_05 ← Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah	0,854	Valid
EK_06 ← Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah	0,684	Valid
EK_07 ← Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah	0,663	Valid

Variabel	Loading Factor	Ket.
EK_08 ← Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah	0,676	Valid
EK_09 ← Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah	0,713	Valid
EK_10 ← Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah	0,788	Valid
FP_1 ← Financial Perspective	0,860	Valid
FP_2 ← Financial Perspective	0,769	Valid
FP_3 ← Financial Perspective	0,728	Valid
FP_4 ← Financial Perspective	0,694	Valid
FP_5 ← Financial Perspective	0,865	Valid
FP_6 ← Financial Perspective	0,852	Valid
FP_7 ← Financial Perspective	0,848	Valid
IBP_1 ← Internal Business Process Perspective	0,866	Valid
IBP_2 ← Internal Business Process Perspective	0,819	Valid
IBP_3 ← Internal Business Process Perspective	0,830	Valid
LGP_1 ← Learning And Growth Perspective	0,729	Valid
LGP_2 ← Learning And Growth Perspective	0,855	Valid
LGP_3 ← Learning And Growth Perspective	0,787	Valid

Sumber: Hasil olah data dengan Smart PLS 3.29

Pengujian kedua yaitu *discriminant validity* yang bertujuan untuk mengkonfirmasi kecocokan setiap indikator pembentuk konstruk, dimana setiap indikator atau pernyataan harus terkelompokan sesuai dengan dimensinya. Pengujian *discriminant validity* dapat dilihat dari hasil *cross loading* yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan *loading factor* terhadap variabel laten lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel laten memiliki *discriminant validity* yang sudah memadai dimana seluruh pernyataan atau indikator sudah mengelompok sesuai dengan dimensi teoritisnya.

Untuk mengetahui akurasi, konsistensi serta ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk yang akan dibentuk maka dilakukan uji reliabilitas yang dapat diketahui dari nilai *Cronchbach's alpha* dan nilai *Composite reliability*. Apabila konstruk memiliki nilai CA dan CR lebih besar dari 0,7 dapat disimpulkan bahwa konstruk pengukur memiliki akurasi, konsistensi serta ketepatan instrumen yang baik. Hasil pengujian dirangkum dalam Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Reliabilitas Konstruk

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
CP	0,928	0,949
EK	0,911	0,926
FP	0,908	0,928
IBP	0,792	0,877
LGP	0,701	0,834

Sumber: Hasil olah data dengan Smart PLS 3.29

Berdasarkan hasil yang tersaji pada Tabel 6 di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pembentuk konstruk adalah reliabel atau dengan kata lain seluruh variabel manifes telah terbukti memiliki akurasi, konsistensi serta ketepatan dalam mengukur konstraknya dikarenakan memiliki nilai *Cronchbach's alpha* dan nilai *Composite reliability* lebih besar dari 0,7 (*critical value*).

b. Evaluasi Model Struktural

Evaluasi model struktural dalam PLS yaitu dapat dilihat dari hasil pengujian signifikansi melalui estimasi koefisien jalur. Untuk menguji signifikansi atau kebermaknaan pengaruh yang terjadi, maka dilakukan pengujian hipotesis yang merujuk pada nilai P-Value dan T-Value (t_{hitung}). Nilai kritis yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini adalah sebesar 1,96 yang merupakan nilai kritis (*critical value*) yang direkomendasikan untuk pengujian hipotesis menggunakan Smart PLS untuk pada taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5%.

Kemudian nilai seluruh faktor harus memiliki nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 sehingga seluruh dimensi dinyatakan signifikan dalam menjelaskan kinerja pemerintah Kota Lhokseumawe melalui penerapan kinerja berbasis *balanced scorecard* dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif berbasis syariah. Selanjutnya besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh masing-masing dimensi berkaitan dengan kinerja pemerintah Kota Lhokseumawe melalui penerapan kinerja berbasis *balanced scorecard* dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif berbasis syariah dapat dihitung dari koefisien jalur ($\rho^2 \times 100\%$).

Selanjutnya penerapan ekonomi kreatif berbasis syariah merupakan faktor paling dominan yang akan mendorong penilaian dan peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan kontribusi yang diberikan yaitu sebesar 16,6%. Faktor selanjutnya yaitu *financial perspective* dengan kontribusi yang diberikan sebesar 9,5%. Adapun faktor paling rendah yang akan mendorong penilaian dan peningkatan kinerja pemerintah yaitu faktor *learning and growth perspective* dengan kontribusi yang diberikan yaitu sebesar 2,3%. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Evaluasi Model Struktural

Variabel	Original Sample (O)	Kontribusi	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
EKS → X	0,407	16,6%	29,146	0,000
FP → X	0,308	9,5%	21,243	0,000
CP → X	0,291	8,4%	20,452	0,000
IBP → X	0,154	2,4%	18,375	0,000
LGP → X	0,152	2,3%	16,272	0,000

Sumber: Hasil olah data dengan Smart PLS 3.29

III.2. Pembahasan

Kesiapan pemerintah daerah Kota Lhokseumawe dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis Syariah sudah sepatasnya dilaksanakan, mengingat bahwa masyarakat sangat membutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk mencapai tingkat kesejahteraan dalam bentuk peningkatan ekonomi daerah. Kondisi perekonomian masyarakat saat ini pasca pandemic Covid-19 telah mendorong pemerintah daerah agar segera menetapkan berbagai kebijakan baru yang mampu mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Melalui bentuk sikap dan kebijakan yang harus diciptakan, maka pemerintah daerah harus memikirkan arah yang tepat dan sasaran yang jelas dalam menciptakan berbagai program demi kemajuan daerah. Sampai saat ini pemerintah harus memikirkan bagaimana untuk mewujudkan kemajuan daerah melalui kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang belum maksimal diciptakan melalui program-program daerah. Pemerintah daerah Kota Lhokseumawe kemudian harus mampu menurunkan berbagai kebijakan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan utama masyarakat.

Salah satu kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang sangat bermanfaat adalah melalui pemilihan objek ekonomi kreatif yang unggul untuk wilayah Kota Lhokseumawe. Kebijakan yang harus dituangkan dalam bentuk Qanun harus berbasis Syariah dimana sistem pengembangan ekonomi kreatif tersebut wajib didasari dari sistem Syariah, misalnya Bagi Hasil pengelolaan objek wisata daerah yang dibantu oleh masyarakat setempat. Pemerintah daerah harus membentuk sebuah sistem pengelolaan yang bersifat terbuka dan dapat dimonitoring pelaksanaannya oleh seluruh pihak terlibat. Kondisi ini jelas akan menciptakan kesinambungan dan harmonisasi daerah untuk mewujudkan msasyarakat yang sejahtera.

Melalui penerapan kinerja yang diukur dengan basis *Balanced Scorecard*, dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa pemerintah daerah Kota Lhokseumawe harus mampu memanfaatkan keuangan daerah yang merupakan kunci pengembangan program-program daerah. Penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga akan mendorong lahirnya kinerja yang optimal dan mudah dipertanggungjawabkan. Melalui penerapan kinerja berbasis BSC ini, pemerintah Kota Lhokseumawe akan dapat menyeimbangkan keseluruhan factor baik keuangan maupun non keuangan. Namun dari hasil penelitian yang diperoleh, semestinya pemerintah daerah

harus Kembali meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sebagai motor penggerak kemajuan daerah. Sampai saat ini pemanfaatan SDM belum dilakukan secara maksimal. Pemerintah harus dapat merumuskan kebijakan pengembangan SDM dalam bentuk peningkatan kapasitas atau kompetensi tertentu untuk percepatan program pengembangan ekonomi kreatif. Melalui SDM yang kuat dan unggul dapat dipastikan bahwa kekuatan daerah akan semakin tinggi karena program yang akan dibangun sangat relevan dan dipahami dengan baik sesuai dengan kondisi daerah saat ini.

Selain kesiapan SDM yang dibutuhkan, pemerintah daerah Kota Lhokseumawe juga harus memikirkan bagaimana untuk memperbaiki sistem internal pemerintahan yang selama ini juga menjadi salah satu faktor yang menentukan. Namun untuk kondisi ini, pemerintah daerah tetap harus menyesuaikan kembali dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun demikian bukan tidak mungkin bahwa pemerintah daerah dengan basis otonomi daerah dapat menciptakan kebijakan-kebijakan yang bersifat mendorong kemandirian daerah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) *Financial perspective* merupakan faktor paling dominan yang akan mendorong penilaian dan peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui penerapan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* bagi pemerintah Kota Lhokseumawe dengan kontribusi yang diberikan yaitu sebesar 9,5%, selanjutnya *customer perspective* dengan kontribusi sebesar 8,4%, *internal business process perspective* 2,4%. Kemudian dimensi *learning and growth perspective* merupakan faktor paling rendah yang akan mendorong penilaian dan peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui penerapan kinerja berbasis *Balanced Scorecard*
- 2) Pemerintah daerah Kota Lhokseumawe terutama perlu menciptakan pola ekonomi kreatif yang mampu mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat secara berkesinambungan berbasis kearifan lokal (syariah). Keputusan ini harus segera dilaksanakan dan sangat sesuai dengan tuntutan daerah Aceh yang saat ini sangat konsisten menjalankan sistem syariah melalui implementasi Qanun LKS No. 11 Tahun 2018.
- 3) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan bidang yang digeluti, sehingga akan menciptakan kualitas SDM yang unggul bagi pengembangan program daerah.
- 4) Perbaikan kualitas proses bisnis internal pemerintah Kota Lhokseumawe juga harus dilakukan dengan menggunakan otonomi daerah yang disesuaikan dengan aturan pemerintah pusat.
- 5) Kesiapan pemerintah Kota Lhokseumawe sejauh ini masih perlu ditingkatkan kembali dengan kebijakan-kebijakan yang lebih inovatif baik terhadap penilaian kinerja maupun pengembangan ekonomi kreatif.

IV.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS, mengindikasikan bahwa peran pemerintah daerah Kota Lhokseumawe harus dituangkan melalui kebijakan lain dalam mendorong pelaksanaan ekonomi kreatif yang berlandaskan sistem syariah.
- 2) Pemerintah daerah harus berupaya untuk menciptakan program-program baru dengan memilih objek ekonomi kreatif yang tepat dalam mengendalikan pelaksanaannya di masa depan melalui penetapan Qanun daerah.
- 3) Pemerintah daerah wajib bekerjasama dengan masyarakat dalam mewujudkan program syariah dalam pengembangan ekonomi kreatif.
- 4) Pengukuran kinerja berbasis *Balanced Scorecard* sebaiknya diimplementasi dalam menjalankan tata Kelola pemerintahan daerah melalui otonomi daerah, namun harus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.
- 5) Bagi penelitian selanjutnya agar dapat menghubungkan implementasi ekonomi kreatif berbasis syariah dengan tata kelola (*good governance*) yang merupakan bagian dari pencapaian kinerja pemerintah daerah.

REFERENSI

- [1] Netty Nurhayati, Fahmi Rizani dan Kadir. (2019). Perbandingan Kinerja Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Infestasi* Volume 15 No. 1, Juni 2019. Halaman 67-82.
- [2] Mayla Surveyandini dan Ady Achadi. (2020). Penilaian Kinerja Perusahaan Melalui Penerapan *Balanced Scorecard*. *Majalah Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol. 17, No. 2, November 2020. P-ISSN 1411-1977.
- [3] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit: Andi. Yogyakarta.
- [4] Budi Tiara Novitasari. (2019). *Balanced Scorecard* Dalam Institusi Pendidikan Lanjut. *Jurnal Nominal*, Volume VIII Nomor 2 Tahun 2019.
- [5] Niko Ramadhani. (2020). Mengenal Ekonomi Kreatif dan Keberadaannya di Indonesia. www.akselerasi.co.id. Diakses tanggal 20 Maret 2022.
- [6] Lucia Vanessa Dewi Lantamsasri. (2020). Pentingnya Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Perekonomian Negara. www.kompasiana.com. Diakses tanggal 25 Maret 2022.
- [7] Sri Wahyuningsih dan Dede Satriani. (2019). Pendekatan Ekonomi Kreatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Desa Pedekik). *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Volume 8, No. 2 Desember 2019. Halaman: 195-205. ISSN: 2303-3568/2684-8228.
- [8] Mulyadi. (2022). Pertumbuhan Ekonomi di Kota Lhokseumawe Meningkat di 2021. www.readers.id. Diakses tanggal 25 Maret 2022.
- [9] A. Usmara. (2003). *Implementasi Manajemen Strategik (Kebijakan dan Proses)*. Penerbit: Amara Books. Yogyakarta.
- [10] Hansen, Don. R dan Mowen, Maryanne. M. (2005). *Management Accounting*. Edisi Ketujuh. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- [11] Kaplan, Robert. S. and David P. Norton. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action*. Harvard Business School Press. USA.
- [12] Vincent Gaspersz. (2002). *Balanced Scorecard* dengan Six Sigma Untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintah. Penerbit PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
- [13] Garrison dan Noreen. (2000). *Akuntansi Managerial*. Terjemahan: Totok Budisantoso. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- [14] Kaplan, Robert. S dan David P. Norton. (2000). *Balanced Scorecard: Menerapkan Strategi Menjadi Aksi*. Alih Bahasa oleh Peter R. Yosi Pasla, MBA. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- [15] Wahyudin Nor. (2012). *Penerapan Balanced Scorecard Pada Pemerintah Daerah*. *AUDI: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Volume 7, No. 2, Juli 2021.
- [16] A.B. Setiawan dan C. AvriLivanni. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Pada pemerintah Daerah (Performance Measurement Analysis of City Government). *Jurnal Akunida*. Volume 6 Nomor 1, Juni 2020. ISSN: 2442-3033.
- [17] Osborne, David and Gaebler, Ted. (1992). *Reinventing Government*. NY Penguin Press: New York.

- [18] Suryana. (2013). *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- [19] Rensi Mei Nandini. (2016). Dampak Usaha Ekonomi Kreatif Terhadap Masyarakat Desa Blawe Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Volume 4, Nomor 1, Januari-April 2016. ISSN: 2303-341X.
- [20] Muhammad. (2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Penerbit: Rajawali Pers. Jakarta.
- [21] Mohamad Hidayat. (2010). *An Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)*. Penerbit: Zikrul Hakim. Jakarta.
- [22] Sri Nurhayati dan Wasilah. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 2 Revisi. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- [23] Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Manajemen dan Akuntansi*. BPFE-UGM. Yogyakarta.
- [24] Sekaran, Uma. (2003). *Research Methods for Business, A Skill Building Approach*. Fourth Edition. John Wiley and Sons, Inc. USA.
- [25] Mudrajad Kuncoro. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit: Erlangga. Jakarta.
- [26] Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Penerbit: Rineke Cipta. Jakarta.
- [27] Hair JR.J.F., Black, W.C., Babin, B.J. and Anderson, R.E. (2010). *Multivariate Data Analysis*. Seventh Edition. Pearson Prentice Hall. New Jersey.
- [28] Bollen. (1989). *Structural Equations With Latent Variables*. A Wiley-Interscience Publication. New York.